

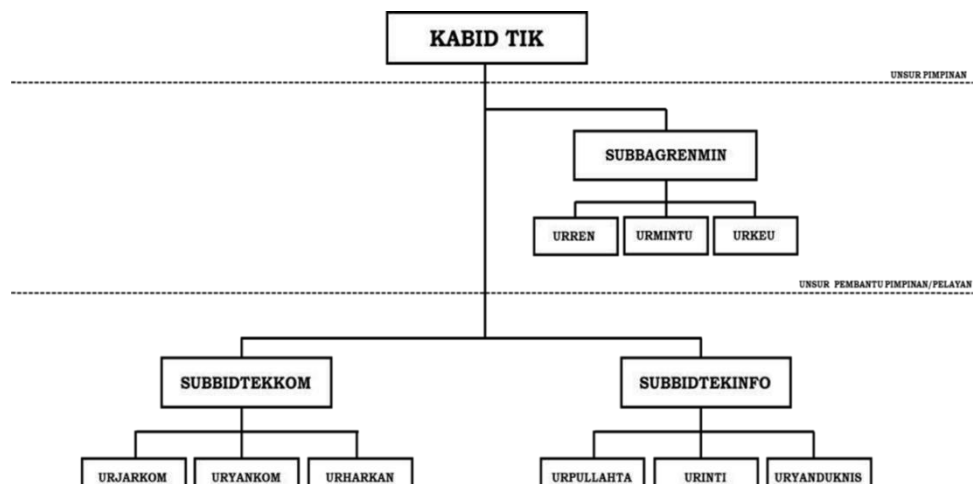
BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Polda

Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri. Maka, lingkup gerak tugas dan wewenang Kepolisian Daerah sejatinya hanya mencakup di wilayah provinsi. Polda bertugas : melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan[1].

2.2 Struktur Organisasi dan Job Deskripsi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bidang TIK

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

Adapun fungsi dari setiap sub bidang organisasi Bid TIK adalah :

1. Kepala Bid TIK
 - a. Sebagai pimpinan dari bidang TIK.
 - b. Mengawasi semua kegiatan anggota polri di bidang TIK.
2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 - a. Urusan Perencanaan (Urren).
 - b. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu).
 - c. Urusan Keuangan (Urkeu).
3. Subbidang Teknologi Komunikasi (Subbidtekkom), terdiri atas:
 - a. Urusan Jaringan Komunikasi (Urjarkom).
 - b. Urusan Pelayanan Komunikasi (Uryankom).
 - c. Urusan Pemeliharaan dan Perbaikan (Urharkan).
4. Subbidang Teknologi Informasi (Subbidtekinfo), terdiri atas:
 - a. Urusan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data (Urpullahta).
 - b. Urusan Infrastruktur Teknologi Informasi (Urinti).
 - c. Urusan Layanan dan Dukungan Teknis (Uryanduknis).

2.3 Sejarah Berdirinya Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

Dalam situasi politik yang tidak stabil pada tahun 1950-an, berpengaruh besar terhadap organisasi militer yang kemudian melahirkan

kekacauan-kekacauan nasional. Beberapa kelompok separates bersenjata muncul di mana-mana. Saat itulah satuan-satuan Mobrig yang setia kepada republik ini secara aktif turut melakukan penumpasan dan pengamanan di berbagai daerah di tanah air. Dari rangkaian sejarah ini, terbentuk Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

Pengabdian Mobrig dalam melaksanakan tugas negara tidak pernah surut. Sekitar tahun 1953, di Kalimantan Selatan, satuan Mobrig yang berasal dari kesatuan di Surabaya dikerahkan untuk memadamkan pemberontakan rakyat pimpinan Letnan Dua Ibnu Hajar, Komandan Pasukan Penggempur Divisi IV ALRI di Kalimantan Selatan. Satuan Mobrig yang berasal dari kesatuan di Surabaya itulah yang menjadi cikal bakal berdirinya Polda Kalsel.

Kekecewaan yang berulang-ulang telah membuat Ibnu Hajar pada bulan Oktober 1950 di Kalimantan Selatan membentuk Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRyT) dan menyatakan gerakannya sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia (Nil) dengan wilayah pergerakannya di daerah Hulu Sungai sepanjang kawasan pegunungan Meratus pada wilayah Kalimantan Selatan. Selain kelompok Ibnu Hajar, ada juga kelompok yang dikenal dengan nama Gerakan Mandau Talawang Panca Sila (GMTPS), pimpinan Christian Simbar di sepanjang sungai Barito di wilayah Kalimantan Tengah. Gerakan Ibnu Hajar dengan KRyTnya dalam aksinya menggunakan takti perang grilya. Aktivitas aksinya semakin meluas ke

wilayah – wilayah Barabai, Birayang, Batumandi, Paringin, Kelua dan Kandangan.

Selain melalui kekuatan bersenjata, dalam menghadapi pemberontakan Ibnu Hajar, pemerintah pusat juga menggunakan pendekatan melalui tokoh – tokoh kharismatik lokal seperti Hasan Basery (mantan komandan Ibnu Hajar) dan Idham Khalid seorang politikus dari Nahdlatul Ulama (NU) untuk membujuk Ibnu Hajar dan Karyanya agar meletakkan senjata dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Awalnya Ibnu Hajar bersedia untuk menyerahkan diri namun setelah menyerahkan diri Ibnu Hajar akhirnya melarikan diri dan melakukan pemberontakan kembali. Selanjutnya pemerintah melakukan tindakan yang tegas sehingga pada akhir tahun 1959 Ibnu Hajar beserta seluruh pengikutnya tertangkap. Ibnu Hajar sendiri akhirnya di hukum mati pada tahun 1963.

Selama mengatasi pemberontakan Ibnu Hajar dan Simbar, berbagai peristiwa heroik terjadi. Salah satunya peristiwa tragis yang mengharukan bagi Bhayangkari Polda Kalsel. Pada 28 September 1953, Mathilda Batlayeri, seorang Bhayangkari gugur bersama ketiga anak dan janin dalam kandungannya pada saat membantu mempertahankan Pos / Asrama Polisi yang diserang oleh gerombolan Karyanya.

Secara formal, bersamaan datangnya pasukan ‘ Mobrig, Kepolisian Kalimantan pada 1953 terbentuk dan berkedudukan pertama di Banjarmasin. Pada awalnya Polda Kalsel dikenal dengan sebutan Kepolisian Keresidenan Kalimantan, di mana pada saat itu Keresidenan

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menjadi satu dand>frkedudukan di Banjarmasin. Baru pada 23 Mei 1957, Keresidenan Kalimantan Tengah resmi berdiri sendiri menjadi provinsi dengan ibukota Palangkaraya. Namun Kepolisian Kalimantan masih mencakup Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah

Berdasar SK Perdana Menteri RI, tanggal 12 Januari 1959, sebutan untuk Kepolisian di Kalimantan yang semula Kepolisian Provinsi (KPPROP) Kalimantan, berubah menjadi Kepolisian Komisariat, (KPKOM). Sementara itu sebutan untuk Kepolisian Resort disingkat KPPRES, dimana pada waktu itu KPKOM Kalsel membawahi 7 KPPRES. Dan berdasar Keputusan Presiden RI tertanggal 12 April 1962, nama Kepolisian Negara kembali berubah menjadi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Menyusul perubahan tersebut, maka sebutan Kepala Kepolisian Negara (yang sekarang disebut Kapolri) berubah menjadi Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia di singkat Menpangak.

Maka sejak itu juga sebutan Markas Besar AKRI di singkat MARAK. Sebutan untuk Kepolisian di tingkat Provinsi menjadi Komando Daerah Angkatan Kepolisian disingkat KOMDAK. Ditingkat Kabupaten di sebut Komando Resort Kepolisian (KOMRES), di tingkat Kecamatan di sebut Komando Sektor (KOMSEK) serta Komando Distrik atau KOMDIS. Sedangkan untuk Pimpinan Kepolisian di tingkat KOMDAK adalah Panglima Komando Daerah Angkatan Kepolisian disingkat Pangdak.

KOMRES adalah Komandan Resort (Danres) dan di tingkat KOMSEK yaitu Dansek dan Dandis.

Sejak itulah Komdak XIII/Kalsel terbentuk. Pada 1962 terjadi musibah kebakaran yang menimpa Markas Komdak XIII/Kalsel dan menghancurkan seluruh bangunan beserta isinya. Pada Juli 1963, Ibnu Khajar dan pengikutnya menyerahkan diri di Desa Ambulun Hulu Sungai Selatan. Pada tahun yang sama juga, berdirilah Lembaga Pendidikan di Banjarbaru yang waktu itu bernama Sekolah Angkatan Kepolisian di singkat SAK (sekarang SPN).

Berdasarkan Surat Keputusan Menhankam/Pangab, maka pada 1974 dilakukan likuidasi antara Komdak XIII/Kalsel dengan Komdak XII/Kalteng menjadi satu komando dengan sebutan KOMDAK XlII/KALRA (Kalimantan Tenggara) dengan Brigjen Pol. Drs. R. Hardono sebagai Kadapol XlII/Kaira yang pertama. Komdak XlII/Kaira yang berstatus tipe “B” itu membawahi 16 Komres dan 129 Komsek.

Sebutan Polda Kalselteng dimulai sejak reorganisasi Polri di tahun 1984. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pangab nomor: Kep/11/X/1992 tanggal 5 Oktober 1992, terjadi likuidasi Polda Kalselteng menjadi Polda Kalsel dan Polda Kalteng yang realisasinya dilaksanakan pada penghujung tahun anggaran 1994/1995. Pemisahan ini ditandai dengan penyerahan Pataka Tunggal Dharma Visudha” untuk Polda Kalsel dan Pataka “Manunggal Dharma Carya Jaya” untuk Polda Kalteng. Maka resmi Polda Kalselteng di likuidasi. Namun akibatnya status Polda Kalsel

yang sebelumnya type “B” dipimpin oleh seorang Brigjen, sejak likuidasi tersebut turun menjadi Type “C” dan di pimpin oleh seorang Kolonel.

Pada perkembangan berikutnya, berdasarkan keputusan Menhankam pada bulan Oktober 1999 –dikukuhkan pada 19 Oktober 1999 – status Polda Kalsel ditingkatkan kembali menjadi type “B” bersama-sama dengan Polda Kalbar, Polda Yogyakarta, Polda Sulut Polda Bali, Polda Aceh, Polda Riau, Polda Jambi, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Polda Maluku. Seiring naiknya status maka dengan sendirinya Polda Kalsel kembali di Pimpin oleh seorang berpangkat Brigjen hingga sekarang.

Perubahan status Polda Kalsel dan lainnya itu sangat berkaitan dengan tuntutan di dalam tubuh Polri berkenaan dengan dan Polri pada tanggal 1 April 1999 yang kinerja Polri khususnya Polda Kalsel untuk dan proaktif[1].

2.4 Sistem Yang Sedang Berjalan

Polda Kalimantan Selatan terutama pada bidang TIK saat ini belum terdapat sistem berbasis website untuk melakukan absensi. Sehingga sekretaris melakukan pemanggilan nama pegawai satu per satu untuk absen.

2.5 Landasan Teori

2.5.1 Perancangan

Perancangan adalah sebuah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi serta didalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya.

2.5.2 Sistem

Sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling berkerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana atau plane yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks.

2.5.3 Absensi

Absensi adalah suatu bentuk pendataan presensi atau kehadiran seseorang atau pegawai yang merupakan bagian pelaporan dari suatu institusi yang berisi data - data status kehadiran yang disusun dan diatur secara rapi dan mudah untuk dicari, dan digunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak yang berkepentingan.

2.5.4 Sistem Absensi

Sistem absensi adalah sebuah sistem yang mencatat kehadiran karyawan berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah diatur. Paling tidak, sebuah data yang dihasilkan dari sistem absensi karyawan akan menampilkan informasi: Waktu datang/Waktu pulang. Waktu terlambat.

2.5.5 Website

Website adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait antar satu halaman dan halaman yang lainnya, yang biasanya ditempatkan pada sebuah server web yang dapat di akses melalui jaringan internet maupun jaringan wilayah lokal (LAN).

2.5.6 MySQL



Gambar 2. 2 MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen *database* yang bersifat *open-source* yang menggunakan perintah dasar atau bahasa pemrograman yang berupa *structured query language* (SQL) yang cukup populer di dunia teknologi.

2.5.7 PHP



Gambar 2. 3 PHP

PHP merupakan singkatan dari PHP : *Hypertext Preprocessor* adalah salah satu Bahasa scripting open source yang banyak digunakan oleh Web Developer untuk pengembangan Web. PHP banyak digunakan untuk membuat banyak project seperti Grafik Antarmuka (GUI), Website Dinamis, dan lain-lain.

2.5.8 Visual Studio Code



Gambar 2.4 Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah aplikasi editor teks gratis dikembangkan oleh Microsoft yang dapat digunakan disemua Bahasa pemrograman yang ada tanpa perlu berganti aplikasi editor, serta dapat dijalankan di berbagai platform *Operating System* (OS) seperti windows, linux dan mac OS.

2.5.9 XAMPP Control Panel



Gambar 2.5 XAMPP Control Panel

XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan komplikasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan Bahasa pemrograman PHP dan Perl.